

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditengah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini yang diakibatkan semakin terdepresiasinya Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika yang sekarang mencapai Rp. 14.515/USD (kurs.dollar.web.id, 22 September 2015), menyebabkan banyak produsen di Indonesia yang mengalami gulung tikar. Hal tersebut diakibatkan bahan baku produksi dalam negeri yang sebagian besar diimpor dari luar negeri mengalami kenaikan harga yang disebabkan kurs dollar yang terus mengalami apresiasi. Dibutuhkan sebuah solusi yang tepat dan berkelanjutan agar krisis ekonomi akibat kurs rupiah yang terdepresiasi ini tidak terulang kembali.

Belajar dari krisis ekonomi sebelumnya, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) lah yang dinilai paling kuat bertahan dan mampu menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan krisis ekonomi selama ini (liputan6.com, 11 Februari 2014). Hal ini karena UMKM mampu berdikari tanpa mengandalkan bahan impor. Sebagian besar bahan baku produksi UMKM berasal dari dalam negeri, sehingga ketika kurs dollar mengalami apresiasi, UMKM tidak terlalu terkena dampaknya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2012 terdapat sekitar 56 juta unit UMKM di Indonesia. Dengan kata lain sekitar 99% pelaku usaha yang ada di Indonesia adalah di sektor UMKM dan 55 juta di antaranya

merupakan usaha mikro. Sektor UMKM menghidupi sekitar 107 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari tenaga kerja di Indonesia (Kusumaningtuti S. Soetiono, 2014)¹.

Untuk itu seharusnya pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat UMKM agar mampu menopang perekonomian Indonesia disaat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia mulai tumbang terkena imbas dollar. Tetapi sayangnya perkembangan UMKM di Indonesia masih jauh dari harapan, salah satu penyebabnya adalah tidak bersinerginya UMKM dengan perbankan karena tingkat literasi keuangan (melek keuangan) UMKM yang masih rendah. Padahal literasi keuangan bagi UMKM sangat diperlukan, karena dapat membuka akses pemenuhan modal bagi pelaku sektor UMKM ke sektor jasa keuangan di Indonesia.

Dari 52 juta rakyat Indonesia yang berusaha di sektor UMKM, baru 25% saja yang bisa mengakses ke lembaga keuangan (Choirul Djahhari, 2014)². Data BI (Bank Indonesia) tahun 2013 menyebutkan bahwa penyaluran kredit untuk sektor UMKM baru sekitar 18% dari total kredit keseluruhan, atau sekitar Rp 635 triliun dari total kredit yang mencapai Rp 3.500 triliun. Jumlah penyaluran kredit ini masih sangat sedikit jika dibandingkan jumlah pelaku usaha UMKM (metrotvnews.com, 7 Agustus 2014).

Perekonomian nasional tidak akan mudah tergoyahkan atau terimbas oleh berbagai krisis keuangan dunia jika masyarakat memahami literasi keuangan

¹ Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK dalam tribunnews.com, 7 Agustus 2014

² Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian UMKM dalam liputan6.com, 11 Februari 2014

(Hadad, 2008)³. Otoritas Jasa Keuangan (2013) mendefinisikan Literasi keuangan sebagai suatu rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Oleh karena itu peningkatan literasi keuangan sangat penting terutama bagi pelaku UMKM yang notabene sangat membutuhkan modal baik modal finansial maupun pengetahuan dalam pengelolaan/manajemen keuangan untuk mengembangkan usahanya.

Pelaku UMKM perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan pengelolaan keuangan dengan baik agar kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Dengan meningkatnya literasi keuangan pada pelaku sektor UMKM, maka akan meningkat pula kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya. Diharapkan UMKM yang selama ini menggunakan jasa rentenir bisa beralih ke lembaga jasa keuangan untuk memenuhi permodalan dalam meningkatkan skala usahanya (Lasmaida S. Gultom, 2015)⁴.

Berbagai negara di dunia sudah melakukan gerakan literasi keuangan secara sukses. Mereka berpandangan bahwa literasi keuangan merupakan program strategis yang sama urgennya dengan program-program nasional lainnya, sehingga literasi keuangan menjadi salah satu program prioritas bagi banyak negara di dunia, seperti Kanada, Australia, India, USA, Inggris, dsb. Gerakan literasi keuangan menjadi program nasional yang bersifat jangka panjang dan dalam implementasinya melibatkan banyak pihak (www.agustiantocentre.com, 22 Februari 2014).

³ Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam Kompas, 21 Oktober 2008

⁴ Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK dalam www.jpnn.com, 23 April 2015

Bhushan and Medury (2013) menjelaskan literasi keuangan sangat penting karena beberapa alasan. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik bisa melalui masa-masa keuangan yang sulit, karena faktanya mereka memiliki akumulasi tabungan, membeli asuransi dan diversifikasi investasi. Literasi keuangan juga secara langsung berkorelasi dengan perilaku keuangan yang positif seperti pembayaran tagihan tepat waktu, angsuran pinjaman, menabung sebelum habis dan menggunakan kartu kredit secara bijaksana.

Adanya pengetahuan keuangan dan literasi keuangan akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan pribadinya, sehingga individu tersebut bisa memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya dan akan meningkatkan taraf kehidupannya. Byrne (2007) menemukan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah, dan menyebabkan bias dalam pencapaian kesejahteraan disaat usia tidak produktif lagi.

Remund (2010) menjelaskan lima domain dari literasi keuangan yakni 1) Pengetahuan tentang konsep keuangan 2) Kemampuan untuk berkomunikasi tentang konsep keuangan 3) Kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi 4) Kemampuan dalam membuat keputusan keuangan 5) Keyakinan untuk membuat perencanaan keuangan masa depan.

Literasi keuangan telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan literasi keuangan berkembang antara lain tingkat bunga tabungan yang rendah, meningkatnya tingkat kebangkrutan dan tingkat hutang, dan meningkatnya tanggung jawab individu untuk membuat

keputusan yang akan mempengaruhi perekonomian mereka di masa depan (Servon & Kaestner, 2008).

Berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan yang dilakukan OJK tahun 2013 yang melibatkan responden sebanyak 8000 orang di 20 provinsi, menyimpulkan bahwa tingkat literasi pada pelaku sektor UMKM hanya sebesar 15,68% dan tingkat utilitas (penggunaan produk dan jasa keuangan) UMKM sebesar 53,34% (viva.co.id, 11 April 2015).

Kusumaningrum (2014) mengemukakan bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia masih rendah, yaitu hanya 21,84% penduduk Indonesia yang tergolong *well literate*, 75,69% *sufficient literate*, 2,06% *less literate*, dan 0,41% *not literate*. Data disajikan pada Tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 berikut:

Tabel 1. 1
Indeks Literasi Keuangan Penduduk Indonesia, 2013

Indeks Literasi Keuangan	%
<i>Well Literate</i>	21,84
<i>Sufficient Literate</i>	75,69
<i>Less Literate</i>	2,06
<i>Not Literate</i>	0,41
Total	100

Sumber: Otoritas Jasa keuangan, 2013

Tabel 1. 2
Utilitas Produk dan Jasa Keuangan Penduduk Indonesia, 2013

Utilitas Produk dan Jasa Keuangan	%
Punya/ pernah menggunakan produk dan jasa keuangan	59,74
Tidak punya/tidak pernah menggunakan produk dan jasa keuangan	40,26
Total	100

Sumber: Otoritas Jasa keuangan, 2013

Tabel 1.3
Utilitas Produk dan Jasa Keuangan Menurut Jenis Produk

Utilitas Produk dan Jasa Keuangan	%
Perbankan	57,28
Asuransi	11,81
Perusahaan Pembiayaan	6,33
Pegadaian	5,04
Dana Pensiun	1,53
Pasar Modal	0,11
Total	100

Sumber: Otoritas Jasa keuangan, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa minat untuk membeli produk di masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan terhadap produk tersebut. Hal Ini jelas berbahaya, karena secara ideal, masyarakat harus memahami terlebih dahulu mengenai risiko suatu produk sebelum membelinya (medanbisnis, 24 Juni 2015).

Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kerugian, baik akibat penurunan kondisi perekonomian dan inflasi atau karena berkembangnya sistem ekonomi yang cenderung boros karena masyarakat semakin konsumtif. Masyarakat banyak yang memanfaatkan kredit rumah dan kartu kredit, tetapi karena pengetahuannya minim, tidak sedikit yang mengalami kerugian atau sering terjadi perbedaan perhitungan antara konsumen dan bank.

Data Bank Dunia menyebutkan, tingkat literasi keuangan Indonesia terendah di kawasan Asia Tenggara (Koestanto, 2014). Perbandingan Indeks Literasi Keuangan yang dirilis oleh *Mastercard Financial Literacy Index* tahun

2013, menempatkan Indonesia pada peringkat 7 se-ASEAN terkait tingkat kecakapan keuangan (kusumaningrum, 2014).

Data disajikan pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Indeks Literasi keuangan Negara ASEAN, 2013

No	Rangking Negara	Indeks Literasi Keuangan	Indeks Literasi Keuangan Perkomponen		
			Pengelolaan Uang Dasar	Perencanaan Keuangan	Investasi
1	Singapura	72	73	80	58
2	Malaysia	70	67	82	62
3	Filipina	68	67	74	58
4	Thailand	68	63	81	61
5	Myanmar	66	54	88	-
6	Vietnam	63	57	80	52
7	Indonesia	60	56	75	47
8	Brunei Darussalam	-	-	-	-
9	Kamboja	-	-	-	-
10	Laos	-	-	-	-
	Rata-rata	67	62	80	56

Sumber : *Mastercard Financial Literacy Index*, 2013

Oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui OJK terus meningkatkan edukasi tentang literasi keuangan bagi seluruh elemen khususnya pelaku sektor UMKM, karena UMKM dinilai sebagai sektor terpenting dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena kontribusinya mencapai 57% pada PDB (Produk Domestik Bruto). Edukasi yang dilakukan OJK sejalan dengan amanat UU OJK tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen pasal 28, 29, dan 30. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan kebutuhan mendasar. Kepercayaan konsumen merupakan prasyarat

dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Edukasi itu juga sesuai dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) Indonesia yang menargetkan *well literate society* tahun 2015 ini.

Salah satu daerah yang menjadi obyek OJK dalam pengedukasian literasi keuangan adalah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat literasi keuangan UMKM di Provinsi Jawa tengah bisa dikatakan cukup rendah, meskipun apabila dibandingkan dengan tingkat literasi UMKM secara nasional, Jawa Tengah masih lebih tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2012, Kredit UMKM di Jawa Tengah yang berhasil disalurkan sebesar Rp. 75,6 Miliar, padahal kredit total yang disediakan sebesar Rp. 251,7 Miliar. Dengan kata lain kredit yang terserap oleh UMKM di Jawa tengah hanya sebesar 30%.

Potensi UMKM di Kabupaten Kudus cukup besar, salah satu inovasi yang dilaksanakan Bupati Kudus adalah KUP (Kredit Usaha Produktif) bagi usaha mikro yang memiliki usaha produktif. Kabupaten kudus merupakan percontohan nasional program penyaluran KUP, sehingga UMKM di kabupaten Kudus mendapat perhatian khusus di Jawa Tengah (Ganjar Pranowo, 2015)⁵.

Kabupaten Kudus secara geografis merupakan wilayah yang sangat strategis karena berada di jalur perlintasan ekonomi antar provinsi, sehingga menjadikan Kota Kudus sebagai sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas tinggi. Kudus adalah salah satu kawasan perdagangan di Pulau Jawa yang berpotensi menjadi pusat perdagangan (*Trade Centre*) berskala Internasional. Keunggulan Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten yang

⁵ Gubernur Jawa Tengah dalam KRjogja.com, 24 Maret 2015

proinvestasi di Jawa Tengah juga dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Kudus sebagai Kabupaten/Kota Proinvestasi peringkat ke-4 dari 32 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah (jatengprov.go.id).

Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Kabupaten Kudus mempunyai banyak industri yang berkembang di masyarakat baik itu skala besar, menengah maupun industri kecil. Data yang diperoleh dari Dinas Perindagkop Kabupaten Kudus pada tahun 2011 menyatakan ada 11.217 buah perusahaan industri/unit usaha di kabupaten Kudus. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri baik yang besar/sedang ataupun industri kecil/rumah tangga.

Menurut data provinsi Jawa Tengah tahun 2013, Jumlah perusahaan di Kabupaten Kudus mencapai 13.482 perusahaan, sedangkan jumlah UMKM di Kudus mencapai 13.593 UMKM dengan konsentrasi bidang usaha yang berbeda-beda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa industri dan unit usaha di Kabupaten Kudus semakin berkembang setiap tahunnya. Salah satu misi Kabupaten Kudus adalah:

“Pemberdayaan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”

Oleh karena itu UMKM di Kabupaten Kudus sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Cara pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus yang telah dilakukan antara lain dengan pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan pembiayaan baik penyediaan dana oleh pemerintah (perbankan dan atau lembaga keuangan non bank) untuk memperkuat permodalan maupun

pemberian jaminan pinjaman usaha oleh LPK (Lembaga Penjaminan Kredit) sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman (kuduskab.go.id).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang analisis tingkat literasi keuangan pelaku sektor UMKM di Kabupaten Kudus dengan judul:

“ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN PELAKU SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka peneliti memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Peneliti membatasi penelitian tentang tingkat literasi keuangan pelaku sektor UMKM kabupaten kudus pada lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan mikro.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi perkembangan UMKM di Kabupaten Kudus?
2. Apa saja aspek dalam penilaian literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Kudus?
4. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi perkembangan UMKM di Kabupaten Kudus.
2. Menganalisis aspek yang digunakan dalam penilaian literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Kudus.
3. Menganalisis tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Kudus.
4. Menganalisis perbedaan tingkat literasi keuangan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di Bidang Teoritis.

- a. Bagi Universitas.

Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi bagi Jurusan Ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait literasi keuangan.

- b. Bagi Peneliti Sendiri.

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan.

- c. Bagi Mahasiswa.

Menambah sarana untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan mengembangkan teori-teori yang didapat khususnya mengenai literasi keuangan.

- d. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Menambah referensi dibidang Ilmu Ekonomi khususnya yang terkait literasi keuangan.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan atau referensi mengenai masalah literasi keuangan.

2. Manfaat di Bidang Praktik

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

Memberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Kudus mengenai tingkat literasi keuangan pelaku sektor UMKM di kabupaten Kudus, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten kudus

b. Bagi Pelaku Sektor UMKM Kabupaten Kudus

Memberikan informasi kepada pelaku sektor UMKM di Kabupaten Kudus tentang tingkat literasi keuangannya, sehingga jika didapatkan tingkat literasi keuangan yang rendah, UMKM bisa lebih meningkatkan literasi keuangannya guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

c. Bagi Masyarakat Sekitar

Apabila Pelaku sektor UMKM dapat meningkatkan literasi keuangannya diharapkan usahanya akan semakin berkembang dan hal tersebut berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat, sehingga masyarakat di Kabupaten Kudus kesejahteraannya juga semakin meningkat.